

Tangerang, 19 Juni 2014

Nomor : 15.01.01/00/06/2014/043  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberlakuan Tarif Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter Pada Bandara Yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura II (Persero)

KEPADA YTH.:

1. Senior General Manager;
  2. Para General Manager.
- PT Angkasa Pura II (Persero)

Di

TEMPAT

*Dengan hormat,*

Menunjuk Keputusan Direksi nomor KEP.15.01.01/00/06/2014.1 tanggal 18 Juni 2014 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter di Bandar Udara Yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana terlampir, bersama ini disampaikan bahwa telah ditetapkan tarif jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter yang akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Senior General Manager dan General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan sosialisasi pemberlakuan tarif jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter dimaksud kepada pengguna jasa terkait di lokasi setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEPUTI DIREKTUR  
BISNIS PENERBANGAN



DENI KRISNOWIBOWO

Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Komersial Kebandarudaraan;
3. Sekretaris Perusahaan.



KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

NOMOR : KEP.15.01.01/06/2014.1

TENTANG

TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN KHUSUS PENERBANGAN CHARTER  
PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN OLEH PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di bandar udara PT Angkasa Pura II (Persero) dan untuk menunjang kelangsungan operasional perusahaan, perlu diatur tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter Pada Bandar Udara yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

6. Anggaran... /2

6. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 tanggal 18 November 2008, yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214);
7. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.01.01/11/2012.2 tentang Peraturan Perusahaan Nomor 40 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Angkasa Pura II (Persero) jls KEP.01.01/00/07/2010/313, KEP.01.01/06/2011.6, KEP.01.01/06/2011.7, KEP.01.01/06/2011.8, KEP.01.01/06/2011.9, KEP.01.01/06/2011.11, KEP.01.01/06/2011.12, KEP.01.01/01/2013 KEP.12.01/00/07/2013/386;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) tentang Penetapan Tarif Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter Pada Bandar Udara yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: BAC.15.01.01/00/04/2014/296

INC-9100/04/IV/2014

Tanggal 22 April 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) TENTANG TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN KHUSUS PENERBANGAN CHARTER PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN OLEH PT ANGKASA PURA II (PERSERO).

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
4. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
6. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
7. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
8. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
8. Perusahaan Angkutan Udara atau Operator Pesawat Udara adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian pesawat udara.
9. Bandar Udara adalah bandar udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero).
10. Senior General Manager/General Manager adalah Kepala Cabang Kantor Cabang Bandar Udara PT Angkasa Pura II (Persero).

## Pasal 2

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter pada Bandar Udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Perhitungan atas pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Khusus Penerbangan Charter pada bandar udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) adalah sebagai berikut:
  - a. Tarif pendaratan pesawat udara dihitung berdasarkan tonase pesawat udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
  - b. Tarif penempatan pesawat udara dihitung berdasarkan *clustering* tonase pesawat udara dan sesuai dengan jangka waktu penempatan pesawat udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal 3

- (1) Pungutan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter, ditagihkan sebelum pesawat udara diberangkatkan dari bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero).
- (2) Pungutan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter pada jam kerja, dilakukan oleh Unit Komersial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk pungutan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter di luar jam kerja, dilakukan oleh Officer In Charge (OIC)/Pejabat setingkat yang ditunjuk oleh Senior General Manager/General Manager.

## Pasal 4

- (1) Para Senior General Manager/General Manager bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pungutan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter.
- (2) Para Senior General Manager/General Manager wajib menyampaikan laporan produksi dan pendapatan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter kepada Unit Bisnis Penerbangan di Kantor Pusat pada tanggal 8 (delapan) setiap bulannya.

## Pasal 5

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Pengenaan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tarif-tarif tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal perusahaan angkutan udara/operator pesawat udara tidak melakukan kewajiban atas pembayaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan khusus penerbangan charter, maka Senior General Manager/General Manager dapat mengenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan *Condition of Use Including Airport Charges*;
  - b. Tidak memberikan pelayanan fasilitas jasa kebandarudaraan, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan angkutan udara/operator pesawat udara belum melakukan kewajiban pembayaran.

(2) Sanksi.../5

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) dan Kantor Otoritas Bandara.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2014.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 18 Juni 2014

a.n. DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA

  
  
ANGKASA PURA II  
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY  
TRI S. SUNOKO

Salinan Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth.:

1. Para Direktur;
2. Senior General Manager/General Manager;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Deputi Direktur Bisnis Penerbangan.

Lampiran Keputusan Direksi  
 PT Angkasa Pura II (Persero)  
 Nomor : KEP.15.01.01/06/2014.1  
 Tanggal : 18 Juni 2014

TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN  
 KHUSUS PENERBANGAN CHARTER PADA BANDAR UDARA  
 YANG DIUSAHAKAN OLEH PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

A. TARIF PENDARATAN PESAWAT UDARA

MTOW (ton)	DOMESTIK		INTERNASIONAL	
	TAHAP I (01 JULI 2014)	TAHAP II (01 JANUARI 2015)	TAHAP I (01 JULI 2014)	TAHAP II (01 JANUARI 2015)
	IDR	IDR	USD	USD
5	375,000	375,000	44.20	44.20
6	412,500	450,000	45.67	47.14
7	450,000	525,000	49.60	55.00
8	487,500	600,000	53.53	62.86
9	525,000	675,000	57.46	70.71
10	562,500	750,000	61.39	78.57
11	565,500	756,000	63.91	79.20
12	567,500	760,000	66.33	79.62
13	595,000	815,000	71.42	85.38
14	622,500	870,000	76.51	91.14
15	650,000	925,000	81.60	96.90
16	677,500	980,000	86.69	102.67
17	705,000	1,035,000	91.78	108.43
18	732,500	1,090,000	96.88	114.19
19	760,000	1,145,000	101.97	119.95
20	787,500	1,200,000	107.06	125.71
21	795,000	1,215,000	110.05	127.29
22	800,000	1,225,000	112.79	128.33
23	825,000	1,275,000	117.62	133.57
24	850,000	1,325,000	122.44	138.81
25	875,000	1,375,000	127.27	144.05
26	900,000	1,425,000	132.10	149.29
27	925,000	1,475,000	136.93	154.52
28	950,000	1,525,000	141.76	159.76
29	975,000	1,575,000	146.59	165.00
30	1,000,000	1,625,000	151.42	170.24
31	1,025,000	1,675,000	156.25	175.48
32	1,050,000	1,725,000	161.08	180.71
33	1,075,000	1,775,000	165.91	185.95
34	1,100,000	1,825,000	170.74	191.19
35	1,125,000	1,875,000	175.56	196.43
36	1,150,000	1,925,000	180.39	201.67
37	1,175,000	1,975,000	185.22	206.90
38	1,200,000	2,025,000	190.05	212.14
39	1,225,000	2,075,000	194.88	217.38
40	1,250,000	2,125,000	199.71	222.62
41	1,275,000	2,175,000	204.66	227.86
42	1,300,000	2,225,000	210.02	233.10
43	1,325,000	2,275,000	215.17	238.33
44	1,350,000	2,325,000	220.33	243.57
45	1,375,000	2,375,000	225.48	248.81
46	1,400,000	2,425,000	230.63	254.05
47	1,425,000	2,475,000	235.79	259.29
48	1,450,000	2,525,000	240.94	264.52
49	1,475,000	2,575,000	246.10	269.76
50	1,500,000	2,625,000	251.25	275.00
51	1,525,000	2,675,000	256.40	280.24
52	1,550,000	2,725,000	261.56	285.48
53	1,575,000	2,775,000	266.71	290.71
54	1,600,000	2,825,000	271.87	295.95
55	1,625,000	2,875,000	277.02	301.19
56	1,650,000	2,925,000	282.17	306.43
57	1,675,000	2,975,000	287.33	311.67
58	1,700,000	3,025,000	292.48	316.90
59	1,725,000	3,075,000	297.64	322.14
60	1,750,000	3,125,000	302.79	327.38
61	1,775,000	3,175,000	307.94	332.62
62	1,800,000	3,225,000	313.10	337.86
63	1,825,000	3,275,000	318.25	343.10
64	1,850,000	3,325,000	323.41	348.33
65	1,875,000	3,375,000	328.56	353.57
66	1,900,000	3,425,000	333.71	358.81
67	1,925,000	3,475,000	338.87	364.05
68	1,950,000	3,525,000	344.02	369.29
69	1,975,000	3,575,000	349.18	374.52
70	2,000,000	3,625,000	354.33	379.76
71	2,025,000	3,675,000	359.49	385.00
72	2,050,000	3,725,000	364.64	390.24
73	2,075,000	3,775,000	369.79	395.48
74	2,100,000	3,825,000	374.95	400.71
75	2,125,000	3,875,000	380.10	405.95
76	2,150,000	3,925,000	385.26	411.19
77	2,175,000	3,975,000	390.41	416.43
78	2,200,000	4,025,000	395.56	421.67
79	2,225,000	4,075,000	400.72	426.90
80	2,250,000	4,125,000	405.87	432.14

B. TARIF PENEMPATAN PESAWAT UDARA

MTOW	Timeline	Domestik IDR	Internasional USD
0 - 20	Free for 1st Hour, > 1 - 12 Hours	300,000	32.86
20.01 - 40		440,000	48.19
40.01 - 60		600,000	65.71
> 60.01		720,000	78.86
0 - 20	12.01 - 24 Hours	450,000	49.29
20.01 - 40		660,000	72.29
40.01 - 60		900,000	98.57
> 60.01		1,080,000	118.29

C. TARIF PENEMPATAN PESAWAT UDARA (SETELAH 24 JAM)

MTOW	Timeline	Domestik IDR	Internasional USD
0 - 20	1 - 12 Hours	150,000	16.43
20.01 - 40		220,000	24.10
40.01 - 60		300,000	32.86
> 60.01		360,000	39.43
0 - 20	12.01 - 24 Hours	225,000	24.64
20.01 - 40		330,000	36.14
40.01 - 60		450,000	49.29
> 60.01		540,000	59.14

a.n. DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA

**ANGKASA PURA II**  
INDONESIA AIRPORT COMPANY

TRI S SUNOKO

